



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS UDAYANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GEDE RAI MAYA TEMAJA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 445667

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 6.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1600 m2/900 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 600.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/500 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 109.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ/MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 93.000.000
2. MOTOR, HONDA D1A02N18M1A/T/SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11A3CBA/T/SPD MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA NC110D/SPD MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 69.100.000

D. SURAT BERTHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 623.988.236

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 7.202.088.236



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

7.202.088.236

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.